

**PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, BELANJA DAERAH,
DANA PERIMBANGAN DAN *LEVERAGE* TERHADAP
KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
PROVINSI JAWA TIMUR**

ARTIKEL ILMIAH

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Penyelesaian
Program Pendidikan Sarjana
Program Studi Akuntansi



Oleh:

BRILIANTI CAHYANING ANISA

NIM : 2016310384

**SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PERBANAS
SURABAYA
2020**

PENGESAHAN ARTIKEL ILMIAH

N a m a : Brilianti Cahyaning Anisa

Tempat, Tanggal Lahir : Surabaya, 01 Agustus 1998

N.I.M : 2016310384

Program Studi : Akuntansi

Program Pendidikan : Sarjana

Konsentrasi : Akuntansi Keuangan

Judul : Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Belanja Daerah, Dana Perimbangan dan *leverage* terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Disetujui dan diterima baik oleh :

Dosen Pembimbing

Tanggal :

(Dr.Nanang Shonhadji, S.E.,Ak.,M.Si.,CA.,CIBA.,CMA)

NIDN : 731087601

Ketua Program Studi Sarjana Akuntansi

Tanggal :

(Dr.Nanang Shonhadji, S.E.,Ak.,M.Si.,CA.,CIBA.,CMA)

NIDN : 731087601

PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, BELANJA DAERAH, DANA PERIMBANGAN DAN *LEVERAGE* TERHADAP KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR

BRILIANTI CAHYANING ANISA

STIE Perbanas Surabaya

2016310384@students.perbanas.ac.id

ABSTRACT

This research aims to test effect of financial performance of regional government in regencies/cities of East Java province. This is a descriptive quantitative research with the object of research is all regencies/cities of East Java. Data used in this research is secondary data obtained from the directorate general of financial balance. The dependent variable in this research is financial performance of regional government by using efficiency ratio in its measurement. While the independent variables in this research are regional revenue (x1), regional expenditure (x2), balance fund (x3), and leverage (x4). This research uses saturated sample technique and obtaining 238 data. This research uses SPSS Ver. 23. Result of this research indicates that independent variables consisting of regional revenue, regional expenditure, balance fund, and leverage simultaneously have effect on financial performance of regional government. While, regional revenue, regional expenditure, and balance fund partially have effect on financial performance of regional government while leverage has no effect on financial performance of regional government.

Keywords: regional revenue, regional expenditure, balance fund, leverage, and financial performance of regional government.

LATAR BELAKANG

Indonesia mengalami krisis ekonomi pada era reformasi tahun 1998 yang mengakibatkan berkurangnya anggaran pendapatan pemerintah sehingga kebutuhan dan pemeliharaan infrastruktur transportasi menjadi tidak terpenuhi. Perubahan yang terjadi di Indonesia banyak sekali yang diakibatkan oleh krisis ekonomi, salah satunya yaitu sistem pemerintahan di Indonesia. Sistem pemerintahan di Indonesia yang semula menggunakan sistem pemerintahan sentralisasi menjadi sistem pemerintahan desentralisasi. Sistem pemerintahan sentralisasi merupakan sistem yang memusatkan segala kewenangan serta tugas sepenuhnya yang berkaitan dengan

Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat dan sistem pemerintahan desentralisasi merupakan seluruh penyerahan wewenang dari pusat kepada daerah untuk dapat mengatur rumah tangganya sendiri dan sistem pemerintahan desentralisasi diharapkan Pemerintah Daerah dapat membiayai pembangunan serta memenuhi kebutuhan dengan menggunakan dananya sendiri dan Indonesia menerapkan sistem desentralisasi pada tahun 1999.

UU No 32 tahun 2004 dan UU Nomor 33 tahun 2004 yang menjadi pokok utama dalam melaksanakan otonomi daerah pada hakekatnya memberikan kesempatan yang besar kepada daerah

untuk memaksimalkan potensi yang dimiliki daerahnya tersebut, baik yang menyangkut sumber daya manusia, sumber daya alam, maupun sumber daya yang lainnya yang merupakan kekayaan dari daerahnya sendiri.

Pelaksanaan tata kelola yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat menyebabkan Pemerintah Daerah harus menyusun rencana anggaran yang dapat membantu menjalankan semua aktivitas atau kegiatan, rencana anggaran tersebut biasanya disebut sebagai APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) (Kusuma, 2017). Pemerintah Daerah diwajibkan untuk menyusun APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) yang berisi tentang penerimaan dan pengeluaran Pemerintah Daerah baik dalam bentuk uang, jasa ataupun barang yang terjadi pada setiap periode anggaran tersebut. Suatu daerah dapat dikatakan berhasil apabila Pemerintah Daerah dapat meningkatkan pertumbuhan pendapatan Pemerintah Daerah dengan baik setiap tahunnya. Keberhasilan ekonomi daerah dapat dilihat dari PAD, tetapi kenyataannya Pemerintah Daerah masih bergantung pada pendapatan transfer yang berasal dari Pemerintah Pusat, pendapatan transfer ini disebut dengan dana perimbangan (Armaja, Ibrahim, & Aliamin, 2015). PAD dan dana perimbangan memiliki kontribusi yang sangat besar sebagai sumber pembiayaan pembangunan nasional sehingga dapat meningkatkan dan mendorong pertumbuhan ekonomi di daerahnya.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu faktor kemandirian yang pendapatannya bersumber dari kegiatan ekonomi daerahnya sendiri. Beberapa macam sumber sumber PAD antara lain berasal dari retribusi daerah, pajak daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah, dan lain lain pendapatan daerah yang sah (budianto & alexander, 2016). Pemerintah Daerah dapat mengatur atau mengelola APBD dengan baik maka akan berdampak semakin besar terwujudnya

pembangunan nasional yang dibiayai oleh daerah sendiri sehingga kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat semakin baik dan terpenuhi.

Berdasarkan fenomena yang adapada awal tahun 2020 yang terjadi di Indonesia terutama di Provinsi Jawa Timur tentang maraknya penyebaran COVID-19. Setiap hari data pasien positif COVID-19 selalu bertambah di setiap kabupaten atau kota yang ada di Jawa Timur, sehingga Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengalokasikan anggaran sebesar Rp. 2,384 triliun untuk penanganan Covid-19 di Jawa Timur. Pemerintah Provinsi Jawa Timur menggelontorkan dana APBD guna untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, baik Pasien positif, pasien negatif, Orang Dalam Pemantauan (ODP), serta orang yang telah meninggal karena wabah Covid-19 ini.

Dana tersebut dialokasikan ke daerah untuk kegiatan penanganan Covid-19, mulai dari promotif, preventif, kuratif, tracing hingga penanganan dampak sosial ekonomi akibat wabah ini. "Jika refocusing dan realokasi anggaran ini diikuti juga oleh tingkat kota/kabupaten untuk kepentingan penanganan Covid-19, maka akan memberikan bantalan sosial yang kuat untuk masyarakat Jawa Timur." kata Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, yang diliput dalam Radar Surabaya (04/04/2020). Berdasarkan fenomena diatas dapat disimpulkan sehingga peneliti menggunakan teori keagenan (Agency Theory).

Teori Keagenan (Agency Theory) merupakan hubungan antara dua pihak yaitu principal dan agen. Teori Keagenan yaitu dimana suatu pihak (principal) memberikan wewenang atau tugas kepada pihak lain (agent) untuk dapat menjalankan serta mengerjakan pekerjaan yang telah diberikan oleh principal. Teori ini digunakan dalam teori ekonomi, teori keputusan, teori organisasi, serta sosiologi (Mulyani & Wibowo, 2017). Sesuai dengan teori ini dapat digambarkan bahwa

antara Pemerintah (agent) dan masyarakat (principal) memiliki hubungan keagenan yang timbul karena adanya suatu kontrak atau perjanjian yang telah ditetapkan. Hubungan teori ini dengan kinerja keuangan Pemerintah Daerah adalah masyarakat sebagai principal mampu memberikan wewenang terhadap Pemerintah Daerah dalam hal mengambil keputusan seperti halnya mana yang perlu diperbaiki dulu dalam hal infrastruktur daerah, misalnya jalanan kota atau kabupaten mana dahulu yang harus diaspal atau diperbaiki. Pemerintah Daerah harus berusaha untuk memaksimalkan pendapatan daerah dan belanja daerah agar dapat meningkatkan kinerja keuangan sehingga dapat memberikan fasilitas atau pelayanan yang terbaik bagi masyarakat di daerahnya sendiri.

Objek penelitian ini menggunakan data sekunder yang diambil dalam website resmi pemerintah di www.djpk.kemenkeu.go.id yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Laporan Posisi Keuangan. Variabel dependen yang digunakan dalam peneliti sekarang yaitu kinerja keuangan dan terdapat empat variabel independen yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Belanja Daerah, Dana Perimbangan dan leverage.

Variabel pertama yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pendapatan Asli Daerah merupakan salah satu pendapatan yang bersumber dari daerahnya sendiri yang dipungut oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku agar dapat mengurangi ketergantungan dana dari Pemerintah Pusat. Semakin besar tingkat pendapatan daerah maka kinerja keuangan Pemerintah Daerah semakin meningkat. Menurut (Rioni & Saraswati, 2019) menyatakan bahwa pendapatan asli daerah (PAD) berpengaruh terhadap kinerja keuangan Pemerintah Daerah tetapi menurut (badjra, Mustanda, & Nyoman, 2017) menyatakan bahwa pendapatan Asli Daerah tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan Pemerintah Daerah.

Variabel Kedua yaitu Belanja Daerah. UU Nomor 32 tahun 2004 menyatakan bahwa belanja daerah merupakan belanja yang bertujuan untuk dapat memenuhi segala kewajiban daerahnya itu sendiri sehingga belanja daerah dapat mengurangi hasil nilai kekayaan daerah dalam periode anggaran yang bersangkutan. Belanja daerah dapat melindungi dan meningkatkan fasilitas masyarakat, contohnya yaitu pelayanan kesehatan, pelayanan alat transportasi, pelayanan pendidikan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang lebih layak sehingga kehidupan masyarakat semakin terjamin (Kusuma, 2017). Belanja daerah dapat digambarkan sebagai pengeluaran keuangan pemerintah dalam pembiayaan belanja langsung ataupun tidak langsung. Menurut (Kusuma, 2017) menyatakan bahwa belanja daerah berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah, tetapi menurut (Nugroho & Prasetyo, 2018) menyatakan bahwa belanja daerah tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan Pemerintah Daerah. Dengan hasil penelitian tersebut maka belanja daerah perlu untuk diteliti lagi.

Variabel ketiga adalah Dana Perimbangan. Dana perimbangan merupakan dana yang diberikan oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah untuk pemerataan pembangunan nasional maka dapat meningkatkan kinerja keuangan Pemerintah Daerah. Sehingga sistem desentralisasi tercapai. Dana perimbangan ini terdiri dari dana bagi hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Menurut (Ayu, 2018) menyatakan bahwa dana perimbangan berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah. Hal ini dapat diartikan bahwa Pemerintah Daerah mampu untuk mengelola dana perimbangan yang berasal dari Pemerintah Pusat dengan baik, tetapi menurut (Ariwibowo, 2015) menyatakan bahwa dana perimbangan tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan Pemerintah Daerah.

Variabel keempat adalah Leverage. Leverage merupakan salah satu sumber pinjaman dana yang berasal dari pihak eksternal dengan maksud untuk meningkatkan keuntungan potensial stakeholder sehingga dapat menggambarkan utang organisasi ataupun instansi terhadap asset yang dimilikinya (Afrian, 2016). Menurut (Sumarjo, 2010) menyatakan bahwa leverage berpengaruh terhadap kinerja keuangan Pemerintah Daerah, tetapi menurut (Kusuma, 2017) menyatakan bahwa leverage tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan Pemerintah Daerah.

KERANGKA TEORITIS DAN HIPOTESIS

Teori Keagenan

Teori Keagenan merupakan teori yang terdapat hubungan antara dua pihak yaitu pihak principal dan pihak agen yang timbul karena adanya suatu perjanjian atau kesepakatan diawal. Pihak yang memberikan wewenang atau tugas biasanya disebut dengan principal, tetapi pihak yang menerima dan mengerjakan wewenang atau tugas disebut dengan agen (Kusuma, 2017). Indonesia merupakan negara demokrasi sehingga memiliki hubungan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah dan Pemerintah Daerah dengan masyarakat. Pemerintahan pusat memberikan tugas atau wewenang yang harus dikerjakan dan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, dan Pemerintah Daerah juga melaksanakan tugas serta wewenang kepada masyarakat sehingga dapat memaksimalkan kesejahteraan masyarakat semakin membaik.

Kinerja keuangan Pemerintah Daerah

Kinerja keuangan Pemerintah Daerah merupakan gambaran tentang pencapaian Pemerintah Daerah dalam mewujudkan dan merealisasi program kerja yang telah direncanakan sebelumnya selama periode yang telah ditetapkan (Rioni & Saraswati, 2019). Kinerja keuangan daerah dapat diukur dengan beberapa cara, salah satunya menggunakan Rasio Efisiensi. Rasio Efisiensi Keuangan

Daerah merupakan gambaran besarnya biaya yang telah dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang telah diterima.

Pendapatan Asli Daerah

Setiap daerah memiliki sumber pendapatan yang berbeda beda guna untuk menghasilkan pendapatan untuk dapat menjalankan roda perekonomiannya. Menurut UU No 33 tahun 2004 menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan yang berasal dari pemerintah daerah yang dipungut berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) mencerminkan tentang tingkat kemandirian suatu Pemerintah Daerah dalam mengelola serta mengurus sendiri sistem pemerintahannya. Semakin tinggi penerimaan pendapatan asli daerah membutuhkan bahwa daerah tersebut mampu untuk melaksanakan sistem desentralisasi dengan baik, serta dapat memperkecil tingkat ketergantungan kepada Pemerintah Pusat. Sebaliknya, apabila semakin kecil penerimaan pendapatan asli daerah maka daerah tersebut belum mampu melaksanakan sistem desentralisasi sehingga tingkat ketergantungan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat sangatlah diperlukan guna untuk memenuhi kebutuhan daerahnya tersebut. Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah berasal dari seluruh kekayaan yang terdapat didaerahnya tersebut. Misalnya, pajak daerah, retribusi daerah, pengelolaan kekayaan yang dipisahkan, serta lain lain pendapatan yang sah. Diharapkan dengan sumber-sumber kekayaan daerah yang ada, pemerintah dapat memenuhi kebutuhannya sendiri tanpa harus menunggu bantuan dari pihak eksternal.

Belanja Daerah

Berdasarkan UU No 33 Tahun 2004 menyebutkan bahwa belanja daerah merupakan semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurangan hasil

kekayaan yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah dalam periode yang dianggarkan.

Belanja daerah memiliki 2 macam jenis, antara lain:

1. Belanja daerah secara langsung

Belanja daerah secara langsung merupakan belanja daerah yang telah direncanakan sebelumnya untuk keperluan aktivitas atau kegiatan Pemerintah Daerah dalam menjalankan program serta kegiatan Pemerintah Daerahnya sendiri.

2. Belanja Tidak Langsung

Belanja tidak langsung merupakan kegiatan belanja daerah yang telah direncanakan sebelumnya tapi tidak memiliki hubungan secara langsung dalam melaksanakan tugas maupun program pemerintah.

Dana Perimbangan

Berdasarkan UU No 25 tahun 1999 yang dimaksud dengan dana perimbangan merupakan dana yang berasal dari penerimaan APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah) yang dialokasikan kepada Pemerintah Daerah yang bertujuan untuk dapat membantu membiayai kebutuhan daerahnya sendiri dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Setiap periode Pemerintah Pusat memberikan pendapatan transfer. Pendapatan transfer merupakan nama lain dari dana perimbangan yang bertujuan sebagai pemerataan disetiap daerahnya sendiri.

Leverage

Leverage menggambarkan perbandingan antara total asset dengan total kewajiban yang dimiliki oleh pemerintahan daerah. Apabila sumber pendapatan asli daerah rendah, tetapi kebutuhan Pemerintah Daerah belum terpenuhi sehingga mengalami kekurangan dana. Maka pemerintah harus meminjam dana kepada pihak eksternal untuk dapat membantu menutupi semua kekurangan dana yang ada di Pemerintah Daerah. Dengan begitu Pemerintah Daerah belum bisa mengelola dan mengurus sendiri

kinerja keuangan pemerintah dengan menggunakan modal sendiri.

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu sumber pendapatan yang berasal dari Pemerintah Daerahnya sendiri dengan cara mengelola sumber daya serta kekayaan lainnya yang ada di daerahnya sendiri, tetapi jika Pemerintah Daerah memiliki pendapatan yang besar tetapi kinerja efisiensinya dinilai masih buruk maka Pemerintah Daerah wajib untuk mengkaji ulang serta memperbaiki semua kesalahan yang telah terjadi dimasa lalu agar kesalahan tersebut tidak terjadi di masa yang akan datang. Menurut (Rioni & Saraswati, 2019) berpendapat bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah. Hasil ini serupa dengan (Ayu, 2018) juga berpendapat bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap kinerja keuangan Pemerintah Daerah.

H1 : Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Pengaruh Belanja Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Belanja Daerah merupakan belanja yang diakui sebagai pengurang nilai dari hasil kekayaan yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan daerahnya sendiri dalam periode yang dianggarkan. Apabila tingkat belanja daerahnya tinggi maka pelayanan yang yang diperuntukan oleh masyarakat semakin baik. Apabila tingkat belanja daerahnya rendah maka pelayanan yang diperuntukkan masyarakat semakin memburuk. berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Kusuma, 2017) menyatakan bahwa belanja daerah berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah.

H2 : Belanja Daerah (BD) berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan

Pengaruh Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.

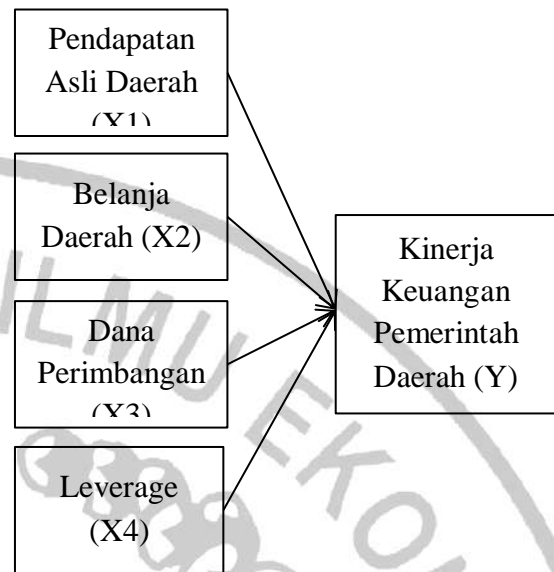
Dana Perimbangan merupakan dana yang berasal dari Pemerintah Pusat yang diberikan kepada Pemerintah Daerah yang bertujuan untuk membantu memenuhi kebutuhan daerah serta pemerataan keuangan masing masing daerah. Dana perimbangan juga disebut dengan pendapatan transfer yang dikirim oleh Pemerintah Pusat dalam periode anggaran. (Mulyani & Wibowo, 2017) menyatakan bahwa dana perimbangan berpengaruh terhadap kinerja keuangan Pemerintah Daerah. Hasil yang sama yang dilakukan oleh (Nugroho & Prasetyo, 2018) menyimpulkan bahwa dana perimbangan berpengaruh terhadap kinerja keuangan Pemerintah Daerah.

H3 : Dana Perimbangan (DP) berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Pengaruh Leverage Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Leverage merupakan hasil perbandingan antara total aset dan total liabilitas pada Pemerintah Daerah. Apabila tingkat *Leverage* yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah rendah maka kinerja keuangannya dapat dikatakan baik. Apabila tingkat *Leverage* yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah tinggi maka kinerja keuangan pemerintah dikatakan buruk. Sehingga Pemerintah Daerah harus untuk mengkaji serta mengevaluasi ulang agar utang terhadap pihak eksternal tidak semakin melonjak tinggi (Ilmiyyah, Dewata, & sarikadarwati, 2017). Menurut (Sumarjo, 2010) menyatakan bahwa *Leverage* berpengaruh terhadap kinerja keuangan Pemerintah Daerah.

H4 : *Leverage* berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah



METODE PENELITIAN

Rancangan Penelitian

Berdasarkan penelitian serta riset, peneliti melakukan penelitian untuk mengetahui kinerja keuangan Pemerintah Daerah pada seluruh Kabupaten atau Kota yang ada di Provinsi Jawa Timur dengan menggunakan deskriptif kuantitatif karena dalam penelitian ini, peneliti menggunakan Laporan keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Penelitian ini menggunakan data sekunder. Peneliti menggunakan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah serta Laporan realisasi Anggaran (LRA) pada tahun 2012-2018.

Definisi Operasional Variabel dan Pengukurannya:

a. Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Y).

Kinerja keuangan Pemerintah Daerah merupakan gambaran tentang pencapaian Pemerintah Daerah dalam mewujudkan dan merealisasi program kerja yang telah direncanakan sebelumnya selama periode yang telah ditetapkan (Rioni & Saraswati, 2019). Penelitian ini menggunakan pengukuran rasio efisiensi. Rumus yang digunakan untuk menghitung rasio efisiensi adalah sebagai berikut:

Ratio

$$\text{Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Belanja Daerah}}{\text{Realisasi Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

b. Pendapatan Asli Daerah (PAD) (X1)

Berdasarkan UU No 33 tahun 2004 menjelaskan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu sumber utama dalam penerimaan pendapatan daerah bertujuan untuk mendanai seluruh kegiatan pemerintah serta dapat membiayai pembangunan nasional di daerahnya sendiri sehingga dapat meningkatkan perekonomian masyarakat daerah serta dapat memperkecil bantuan pendanaan yang berasal dari Pemerintah Pusat dan kehidupan masyarakat menjadi lebih baik. PAD dapat diukur dengan cara (Ayu, 2018) :

$$\text{PAD} = \text{Pajak daerah} + \text{Retribusi daerah} + \text{hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan} + \text{lain lain PAD yang sah}$$

c. Belanja Daerah

Berdasarkan UU No. 33 tahun 2004 menjelaskan bahwa belanja daerah merupakan belanja yang dapat mengurangi nilai kekayaan bersih daerah ataupun pendapatan daerah yang bertujuan untuk dapat memenuhi seluruh kebutuhan Pemerintah Daerah. Setiap masing masing daerah memiliki anggaran belanja yang berbeda sesuai dengan kebutuhan tiap pemerintahannya (Kusuma, 2017). Perbedaan antara anggaran belanja tiap daerah tersebut, maka peneliti menggunakan komposisi belanja langsung dan tidak langsung suatu kota/ kabupaten di Jawa Timur sehingga dapat mengetahui belanja daerah tersebut. Berikut rumus belanja daerah :

$$\text{Belanja Daerah} = \text{Belanja langsung} + \text{belanja tidak langsung}$$

d. Dana Perimbangan

Dana Perimbangan merupakan dana bantuan yang berasal dari APBN yang diberikan dan dialokasikan kepada Pemerintah Daerah yang bertujuan untuk dapat memenuhi kebutuhan pemerintah dan dapat meningkatkan kinerja keuangan Pemerintah Daerah. Dana perimbangan merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kinerja keuangan Pemerintah Daerah karena dengan adanya dana perimbangan dapat membantu pemerataan pembangunan nasional disetiap daerah sehingga perekonomian masyarakat daerah menjadi lebih baik dan sistem desentralisasi dapat berjalan. Berikut merupakan rumus dana perimbangan :

$$\text{Dana Perimbangan} = \text{Dana bagi hasil pajak} + \text{Dana bagi hasil bukan pajak} + \text{Dana Alokasi Umum} + \text{Dana Alokasi Khusus}$$

e. Leverage

Leverage merupakan proporsi untuk menggambarkan seberapa besar utang Pemerintah Daerah dari pihak eksternal dibandingkan modal sendiri dalam mendanai semua kebutuhan pemerintahannya. Berikut merupakan rumus dari *Leverage* :

$$\text{Leverage} = \frac{\text{Debt}}{\text{Equity}}$$

Populasi dan Teknik Pengambilan Sampel

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh kabupaten atau kota yang ada di Provinsi Jawa Timur dengan periode 2012-2018. Didalam data keuangan Pemerintah Daerah terdapat 29 kabupaten dan 9 kota di Provinsi Jawa Timur Sampel yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan sampel jenuh. Teknik pengambilan ini menggunakan *sampling* jenuh.

Data dan Metode Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang berupa

laporan keuangan tahunan. sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data yang berasal dari www.djpk.kemenkeu.go.id

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis kuantitatif. Penelitian ini menggunakan SPSS 23 dengan beberapa teknik, antara lain analisis statistik deskriptif, uji asumsi klasik, uji model dan analisis regresi linier berganda.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Tabel 4.1

Hasil Pengujian Normalitas Kolmogorov-smirnov

One-sample Kolmogorov Smirnov Test	
	Unstandardized residual
N	201
Test Statistic	.059
Asymp. Sig. (2-tailed)	.090 ^c

Sumber : Data yang diolah,2020

Berdasarkan hasil pengolahan pada tabel 4.1 nilai *Kolmogorov smirnov* sebesar 0,036 dan nilai *asyp.sig.(2-tailed)* sebesar 0,200 dengan jumlah sampel sebanyak 238 data. yang berarti bahwa nilai *asyp.sig (2-tailed)* $0,200 \geq 0,05$ sehingga H_0 ditolak dan dapat diartikan bahwa data residual berdistribusi normal. Berikut adalah ringkasan hasil pengujian normalitas yang telah dilakukan sebanyak 3 kali sehingga mendapatkan hasil yang berdistribusi normal:

Pengujian	N	Sig	Keterangan
Pertama	264	.000	Data tidak berdistribusi normal
Kedua	252	.000	Data tidak berdistribusi normal
Ketiga	238	.200	Data berdistribusi normal

Tabel 4.2
Hasil Pengujian Multikolinieritas

Model	Colinearity Statistics		Keterangan
	Tolerance	VIF	
PAD	,181	5.530	Tidak Terjadi Multikolinieritas
BD	,033	30.596	Terjadi Multikolinieritas
DP	,056	17.995	Terjadi Multikolinieritas
LEVE-RAGE	,966	1.035	Tidak Terjadi Multikolinieritas

Sumber: Data yang diolah,2020

Dari hasil uji multikolinieritas pada tabel 4.2 dapat disimpulkan bahwa terdapat dua model yang tidak terjadi multikolinieritas yaitu model PAD dan model Leverage. Model PAD memiliki *tolerance* sebesar 0,181 dengan VIF sebesar 5.530 dan model Leverage memiliki *tolerance* sebesar 0,966 dengan VIF sebesar 1.035, dan selanjutnya terdapat 2 model yang terjadi multikolinieritas yaitu Model BD dan DP. Model BD memiliki nilai *tolerance* sebesar 0,033 dengan VIF sebesar 30.596 dan model DP memiliki nilai *tolerance* sebesar 0,056 dengan VIF sebesar 17.995.

Tabel 4.3
Hasil Pengujian Autokorelasi

Model	Durbin-Watson
1	1.715

Sumber: data yang diolah,2020

Berdasarkan hasil Uji Autokorelasi yang menggunakan metode Uji Durbin-Watson pada tabel 4.6 menunjukkan bahwa Uji D-W memiliki nilai sebesar 1.715. Dengan menggunakan tingkat signifikansi sebesar 5% atau setara dengan 0,05. Total

sampel pada penelitian ini sebanyak 238 data dan menggunakan 5 variabel yaitu 4 variabel independen dan 1 variabel dependen ($n=238, k=5$), dengan data tersebut maka batas nilai dL sebesar 1.75473 dan nilai dU sebesar 1.82246 sehingga $4-dU$ yaitu sebesar 2.17754. Nilai DW 1.715 kurang dari dU 1.82246 sehingga dapat disimpulkan bahwa terjadi autokorelasi

Tabel 4.4
Hasil Pengujian Heteroskedastisitas

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error			
constant	3.724	.506		7.356	.000
PAD	-1.782	.000	-.132	-.862	.389
BD	8.334	.000	.237	.657	.512
DP	-1.388	.000	-.220	-.796	.427
LEVERAGE	20.200	30.054	.045	.672	.502

Sumber: data yang diolah, 2020

Dari hasil Uji Gletser pada tabel 4.4 menunjukkan bahwa variabel independen yaitu PAD memiliki nilai sig sebesar 0,389 > 0,05 yang berarti tidak terjadi heteroskedastisitas, BD memiliki nilai sig sebesar 0,512 > 0,05 yang berarti tidak terjadi heteroskedastisitas, DP memiliki nilai sig sebesar 0,427 yang berarti tidak terjadi heteroskedastisitas, dan leverage memiliki nilai sig sebesar 0,502 yang berarti tidak terjadi heteroskedastisitas. Maka dapat disimpulkan bahwa variabel independen dalam penelitian ini tidak terjadi heteroskedastisitas.

Tabel 4.5
Hasil Uji Statistik F (Anova)

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	934.518	4	233.630	12.929	.000 ^b
	Residual	4210.347	233	18.070		
	Total	5144.865	237			

Sumber : Data yang diolah, 2020

Berdasarkan pada tabel 4.5 menunjukkan bahwa nilai signifikansi pada hasil Uji Statistik F (Anova) sebesar $0.000 < 0.05$ maka H_0 ditolak, dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh variabel independen Pendapatan Asli Daerah, Belanja Daerah, Dana Perimbangan, dan Leverage secara simultan terhadap variabel dependen Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah, Model regresi fit.

Tabel 4.6
Hasil Uji Koefisien Determinasi (r^2)

Model	R	R Square	Adjusted R Square
1	.426 ^a	.182	.168

Sumber: Data yang diolah, 2020

Berdasarkan hasil output pada tabel 4.6 menunjukkan nilai koefisien determinasi sebesar 0,168 hal ini dapat disimpulkan bahwa 16,8% variabel Kinerja Keuangan Pemerintah daerah dapat dijelaskan oleh variabel Pendapatan Asli Daerah, Belanja Daerah, Dana Perimbangan, dan Leverage sedangkan sisanya 83,2% ($100\% - 16,8\%$) dijelaskan oleh variabel lain diluar dari variabel yang tidak diteliti saat ini.

Tabel 4.7
Hasil Uji Statistik t

Model	t	Sig.
Constant	111.345	.000
PAD	-4.355	.000
BD	4.332	.000
DP	-2.773	.006
Leverage	1.370	.172

Sumber: Data yang diolah, 2020

Berdasarkan pada Hasil Uji Statistik t pada tabel 4.7 dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Jika seluruh variabel dianggap konstan (tidak berpengaruh) maka nilai Kinerja

Keuangan Pemerintah Daerah sebesar 93.475.

- b. Variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) memiliki t hitung sebesar -4.355 dengan nilai signifikansi sebesar $0.000 < 0,05$ hal ini dapat disimpulkan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh secara negatif terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.
- c. Variabel Belanja Daerah (BD) memiliki t hitung sebesar 4.332 dengan nilai signifikansi sebesar $0.000 < 0.05$ hal ini dapat disimpulkan bahwa Belanja Daerah berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah
- d. Variabel Dana Perimbangan (DP) memiliki t hitung sebesar -2.773 dengan nilai signifikansi sebesar $0.006 < 0.05$ hal ini dapat disimpulkan bahwa Dana Perimbangan berpengaruh secara negatif terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.
- e. Variabel Leverage memiliki t hitung sebesar 1.370 dengan nilai signifikansi sebesar 0.172 hal ini dapat disimpulkan bahwa Leverage tidak berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.

Hasil Uji Hipotesis

Hipotesis	Keterangan	Hasil Pengujian
H1	Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah	H1 diterima
H2	Belanja Daerah berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah	H2 diterima
H3	Dana Perimbangan berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah	H3 diterima
H4	Leverage tidak berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah	H4 ditolak

Tabel 4.8
Hasil Pengujian Analisis Regresi Linier Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	93.475	.840		111.345	.000
PAD	-1.492	.000	-.607	-4.355	.000
BD	9.114	.000	1.420	4.332	.000
DP	-8.012	.000	-.697	-2.773	.006
LEVERAGE	68.281	49.837	.083	1.370	.172

Sumber: Data yang diolah, 2020

Dari hasil diatas maka analisis regresi linier berganda diperoleh sebagai berikut :
 $Y = 93.475 - 1.492 (PAD) + 9.114 (BD) - 8.012 (DP) + 68.281 (Leverage) + e$

Keterangan :

PAD : Pendapatan Asli Daerah

BD : Belanja Daerah

DP : Dana Perimbangan

e : Error

Interpretasi dari model persamaan diatas adalah sebagai berikut :

- a. Jika seluruh variabel independen yaitu Pendapatan Asli Daerah, Belanja Daerah, Dana Perimbangan dan leverage dianggap konstan maka nilai variabel dependen yaitu KKPD sebesar 93.475
- b. Koefesien regresi pada variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar -1.492 menunjukkan bahwa setiap penurunan Pendapatan Asli Dearah (PAD) jika variabel Belanja Daerah (BD), Dana Perimbangan (DP) dan Leverage dianggap konstan (tidak berpengaruh) maka KKPD turun sebesar -1.492.
- c. koefesien regresi pada variabel Belanja Daerah (BD) sebesar 9.114 menunjukkan bahwa setiap kenaikan Belanja Daerah (BD) jika variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan (DP) dan Leverage dianggap konstan (tidak berpengaruh) maka KKPD naik sebesar 9.114.
- d. Koefesien regresi pada variabel Dana Perimbangan (DP) sebesar -8.012 menunjukkan bahwa setiap penurunan satu kesatuan unit Dana Perimbangan (DP) jika variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD), Belanja Daerah (BD) dan Leverage dianggap konstan (tidak

- berpengaruh) maka KKPД turun sebesar -8.012
- e. Koefisien regresi pada variabel Leverage sebesar 68.281 menunjukkan bahwa setiap kenaikan satu kesatuan unit Leverage jika variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan (DP) dan Belanja Daerah (BD) dianggap konstan (tidak berpengaruh) maka KKPД naik sebesar 68.281.
 - f. Error merupakan variabel pengganggu diluar variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan (DP), Belanja Daerah (BD) dan Leverage.

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Pendapatan Asli Daerah merupakan salah satu sumber penerimaan atau pendapatan yang dimiliki oleh pemerintah daerah yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan daerahnya sendiri. Semakin tinggi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain lain pendapatan asli daerah yang sah maka menunjukkan bahwa daerah tersebut dapat dikatakan mandiri karena mampu untuk memenuhi seluruh kebutuhan pemerintahannya serta dapat membiayai pembangunan nasional di daerahnya dengan menggunakan dananya sendiri, dan dapat memperkecil bantuan pendanaan yang berasal dari pemerintah pusat. Besarnya Pendapatan Asli Daerah yang dihasilkan dapat mengukur seberapa besar pemerintah daerah dalam mengelola sumber daya baik sumber daya alam, sumber daya manusia, ataupun sumber daya lainnya yang berasal dari pemerintahannya. Hubungan antar variabel yaitu Semakin tinggi Pendapatan Asli Daerah maka Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah dapat dikatakan berhasil karena dapat memaksimalkan retribusi daerah dan pajak daerah serta seluruh sumber daya yang ada di pemerintahannya.

Berdasarkan hasil Uji Statistik dengan menggunakan SPSS versi 23 dapat ditarik kesimpulan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh secara negatif terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur. Hal ini dikarenakan pemerintah daerah dengan Pendapatan Asli Daerah yang tinggi tetapi tidak diikuti dengan kinerja keuangan yang baik pula diharapkan pemerintah daerah dapat melakukan perubahan untuk kedepannya. Pemerintah daerah harus dapat melihat peluang serta menggali potensi kekayaan daerahnya sendiri sehingga bukan hanya satu saja sumber pendapatan daerah, tetapi seluruh potensi yang ada di daerahnya sendiri perlu untuk digali dan dioptimalkan sehingga sumber pendapatan dapat meningkat.

Sesuai dengan teori keagenan (Agency Theory), Masyarakat selaku Principal memberikan tugas atau wewenang kepada pemerintah daerah selaku agen untuk dapat mengelola serta mengurus seluruh pendapatan di daerahnya sendiri baik yang bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan, dan lain lain pendapatan yang sah serta seluruh sumber daya yang berasal dari daerahnya sendiri yang dapat berguna untuk membiayai seluruh kebutuhan daerahnya sendiri seperti pembangunan nasional, meningkatkan fasilitas umum, serta dapat mengurangi kesenjangan sosial sehingga kebutuhan masyarakat menjadi terpenuhi dan hidup lebih sejahtera.

Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian sebelumnya yaitu dengan Dwi Saraswati (2019), Putri Puspita Ayu (2018) dan Sri Mulyani (2017) menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.

Pengaruh Belanja Daerah (BD) terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.

Belanja Daerah merupakan belanja yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan pemerintah daerah yang bertujuan untuk memenuhi seluruh kebutuhan pemerintah daerah pada periode berjalan. Belanja daerah terdiri dari belanja langsung dan belanja tidak langsung. Semakin besar belanja daerah maka pelayanan yang diberikan kepada masyarakat semakin baik, semakin rendah belanja daerah maka pelayanan kepada masyarakat semakin memburuk.

Belanja daerah perlu untuk dilakukan karena untuk memenuhi kebutuhan daerahnya sendiri serta masyarakat, dan sebagai contoh belanja untuk fasilitas umum seperti belanja untuk bahan baku pembuatan jembatan, bahan baku untuk pembuatan jalan, serta belanja lainnya sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang nantinya masyarakat lebih sejahtera dan dapat mengurangi angka kemiskinan di daerah tersebut. Hubungan antar variabel yaitu apabila Belanja Daerah semakin rendah tiap tahunnya maka Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah dikatakan berhasil karena dapat memaksimalkan jumlah anggaran belanja daerah dan tidak melibihi batas yang telah di anggarkan sebelumnya, dan sebaliknya apabila tiap tahun belanja daerah semakin meningkat maka Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah semakin memburuk dan dianggap tidak efisien dalam menggunakan anggaran belanja, baik belanja langsung maupun tidak langsung.

Berdasarkan hasil uji statistik dengan bantuan aplikasi SPSS versi 23, sehingga dapat disimpulkan bahwa Belanja Daerah berpengaruh secara positif terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Provinsi Jawa Timur. Hal ini dikarenakan kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur memiliki realisasi belanja daerah yang besar sehingga tingkat pelayanan yang diberikan pemerintah daerah kepada masyarakat semakin baik sehingga masyarakat menjadi lebih sejahtera.

Sesuai dengan teori keagenen (Agency Theory) pemerintah daerah sebagai agen diberi wewenang untuk dapat mempertanggungjawabkan seluruh kebutuhan masyarakat serta harus dapat meningkatkan pelayanan masyarakat (Principal) dalam rangka pembelanjaan baik belanja langsung maupun belanja tidak langsung yang bertujuan agar masyarakat dapat hidup lebih sejahtera dan dapat merasakan fasilitas yang telah diberikan kepada pemerintah daerah.

Hasil penelitian ini sama dengan peneliti terdahulu yaitu Aulia Rizka Kusuma (2017) menyatakan bahwa belanja daerah berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.

Pengaruh Dana Perimbangan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Dana Perimbangan merupakan dana yang berasal dari pemerintah pusat dengan tujuan untuk dapat membantu pemerintah daerah dalam memenuhi kebutuhan daerahnya serta dapat pemeratakan keuangan di masing masing daerah sehingga sistem desentralisasi dapat berjalan dengan baik. Dana Perimbangan terdiri dari Dana Bagi Hasil pajak / bagi hasil bukan pajak, Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Hubungan antar variabel yaitu jika realisasi belanja daerah lebih tinggi daripada pendapatan daerah maka menimbulkan defisit sehingga kinerja keuangan dianggap tidak berhasil dalam memanfaatkan dana perimbangan, dan jika dalam Dana Perimbangan tersebut pemerintah daerah mampu untuk memaksimalkan realisasi Belanja Daerah dan tidak terjadi defisit maka pemerintah daerah dianggap berhasil dan mampu untuk memanfaatkan dana perimbangan yang berasal dari pemerintah pusat tersebut.

Berdasarkan hasil uji statistik dengan bantuan aplikasi SPSS versi 23 dapat disimpulkan bahwa Belanja Daerah

berpengaruh secara negatif terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah, hal ini dikarenakan semakin tinggi dana perimbangan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat, maka semakin turun nilai kinerja keuangan Pemerintah Daerah. Dana perimbangan yang berasal dari pemerintah pusat yang diberikan kepada pemerintah daerah dapat menutupi dan mengurangi kesenjangan anggaran bagi Pemerintah Daerah yang akan digunakan untuk melakukan kegiatan ekonomi untuk meningkatkan kinerja keuangan daerahnya sendiri.

semakin besar dana perimbangan yang diterima oleh pemerintah daerah maka akan semakin besar ketergantungan pemerintah daerah kepada pemerintah pusat guna untuk memenuhi kebutuhan daerahnya. Sehingga Kinerja Keuangan pemerintah daerah semakin menurun.

Besar kecilnya dana perimbangan yang diberikan oleh pemerintah pusat dapat mempengaruhi Kinerja Keuangan. Ketergantungan pemerintah daerah terhadap dana perimbangan yang tinggi menjadikan pemerintah daerah sulit untuk maju dan berkembang sehingga prinsip otonomi daerah akan sulit untuk dicapai jika pemerintah daerah masih bergantung pada pemerintah pusat.

Sesuai dengan teori keagenan (*Agency Theory*) pemerintah daerah selaku agent harus bertanggungjawab sepenuhnya kepada pemerintah pusat (*Principal*), karena pemerintah pusat memberikan tugas atau wewenang kepada pemerintah daerah untuk dapat mengelola serta mengatur Dana Perimbangan yang berasal dari pemerintah pusat dengan sebaik-baiknya.

Hasil penelitian ini sama dengan penelitian terdahulu yaitu Putri Puspita Ayu (2018), Tatas Ridho Nugroho (2018), Nyanyu Miftahul (2017), Rina dan sumaryanto (2017), Sri Mulyani (2017), Ida Bagus (2017), dan Hendro Sumarjo

(2010) menyatakan bahwa Dana Perimbangan berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.

Pengaruh *Leverage* terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Leverage merupakan suatu tolak ukur untuk mengetahui seberapa besar total liabilitas pada pemerintah daerah dibandingkan dengan total asset yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Hubungan antar variabel yaitu apabila tingkat *leverage* rendah maka kinerja Keuangan pemerintah daerah semakin baik itu artinya pemerintah daerah mampu untuk mengelola atau mengurus daerahnya sendiri dengan menggunakan pendapatan yang berasal dari daerahnya sendiri tanpa harus memerlukan pinjaman dana kepada pihak eksternal. Apabila tingkat *leverage* tinggi maka kinerja keuangan pemerintah daerah dikatakan buruk karena pemerintah daerah perlu membutuhkan dana yang berasal dari pihak eksternal untuk dapat menutupi defisit dan untuk memenuhi kebutuhan daerahnya sendiri.

Berdasarkan hasil uji statistik dengan bantuan aplikasi SPSS versi 23, sehingga dapat disimpulkan bahwa *Leverage* tidak berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Hasil ini tidak sesuai dengan teori keagenan dikarenakan besar kecilnya *leverage* tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah hal ini dikarenakan pemerintah daerah kabupaten/kota Provinsi Jawa Timur memiliki utang yang relatif kecil dibandingkan dengan modal yang dimiliki oleh masing masing pemerintah daerah dan pemerintah daerah baik kabupaten/kota memiliki dana internal yang cukup untuk memenuhi kebutuhan daerahnya sendiri tanpa harus meminjam dana kepada pihak eksternal.

Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian terdahulu yaitu Dwi

saraswati (2019), Rina Novia (2019), Aulia Rizka Kusuma (2017), dan nyanyu miftahul (2017) menyatakan bahwa *Leverage* tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah

KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN

Kesimpulan

- 1 Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh secara negatif terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur.
- 2 Belanja Daerah (BD) berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur.
- 3 Dana Perimbangan (DP) berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur.
- 4 Leverage tidak berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur.

Keterbatasan

Penelitian ini memiliki keterbatasan pada uji Multikolinieritas, Uji Autokorelasi dan Uji Heterokedastisitas terdapat kasus kasus dalam variabel tersebut.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian tersebut maka saran yang peneliti berikan antara lain:

- 1 Bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk menggunakan rasio yang lain dalam mengukur KKPd diantaranya terdapat rasio efektivitas, rasio kemandirian, rasio keserasian dan rasio pertumbuhan.
- 2 Bagi pemerintah daerah disarankan agar tetap mempertahankan serta meningkatkan sumber daya yang terdapat di darahnya sendiri agar

mendapatkan pendapatan yang besar lagi dan akan berdampak kepada Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.

DAFTAR RUJUKAN

- Afriani, G. (2016). Pengaruh karakteristik pemerintah daerah, temuan audit, dan leverage terhadap kinerja pemerintah daerah. *JOM FEKON Vol 3 No 1*, 1050.
- Ariwibowo, T. (2015). Pengaruh Dana Perimbangan dan Belanja Daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah sebagai variabel pemoderasi. *Jurnal Akuntansi dan sistem teknologi informasi Vol. 11*, 344.
- Armaja, Ibrahim, R., & Aliamin. (2015). Pengaruh kekayaan daerah, dana perimbangan, dan belanja daerah terhadap kinerja keuangan. *Jurnal Perspektif ekonomi darussalam*, 181.
- Ayu, P. P. (2018). Analisis PAD dan Dana Perimbangan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah se Jawa barat. *Jurnal akuntansi dan ekonomi*, 96.
- badjra, i. b., Mustanda, I. k., & Nyoman, A. (2017). Kontribusi Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap belanja modal dan kinerja keuangan daerah provinsi bali. *Jurnal Akuntansi Indonesia Vol. 6 No. 1*, 40.
- budianto, & alexander, s. w. (2016). Pengaruh PAD dan Dana Perimbangan terhadap kinerja keuangan pemerintah kabupaten/kota di provinsi sumatera utara. *Jurnal EMBA*, 851.
- Ghozali, I. (2007). Aplikasi analisis multivariate dengan program SPSS. Semarang: Badanpenerbit UNDIP.
- Ilmiyyah, N. M., Dewata, e., & sarikadarwati. (2017). Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah kab/kota di sumatera

selatan. *Jurnal akuntansi, ekonomi dan ilmu bisnis vol.5 No 1*, 162.

Kusuma, A. R. (2017). pengaruh karakteristik pemerintah daerah terhadap efisiensi kinerja keuangan pemerintah daerah . *Jurnal ilmu dan riset akuntansi volume 6, Nomor 1*, 420.

Mulyani, S., & Wibowo, H. (2017). Pengaruh Belanja Modal, ukuran pemerintah daerah, intergovernmental revenue dan pendapatan asli daerah (PAD) terhadap kinerja keuangan . *Kompartemen, Vol.XV No.01*, 66.

Nugroho, T. R., & Prasetyo, N. E. (2018). Pengaruh karakteristik pemerintah daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota di jawa timur. *akuntansi dan pendidikan Vol. 7 No. 1*, 34.

Purwati, R., & sumaryanto. (2017). pengaruh pajak daerah, retribusi daerah dan dana perimbangan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten dan kota di pulau jawa timur 2017. *ilmu akuntansi*, 16.

Rioni, y. s., & Saraswati, D. (2019). Pengaruh Pendapatan Asli Dearah, ukuran pemerintah daerah, leverage terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. *Jurnal Akuntansi Bisnis dan Publik*, 120.

Siregar, B. (2017). *Akuntansi Sektor Publik (Akuntansi keuangan pemerintah daerah berbasis akrual)*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.

Sumarjo, H. (2010). Pengaruh Karakteristik pemerintah daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah . *Fakultas ekonomi USM*, 61.